

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA
KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG BULUSARI KECAMATAN
BUMIRATU NUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014**

Oleh:

RENDI PRATAMA

NPM. 1902031010



Prodi: Hukum Tata Negara

Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1445 H/2024 M

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA
KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG BULUSARI KECAMATAN
BUMIRATU NUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas
Dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tata Negara

Oleh:
Rendi Pratama
NPM. 1902031010

Pembimbing: Sainul, S.H, M.A

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :


Nama : RENDI PRATAMA
NPM : 1902031010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA
KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG BULUSARI
KECAMATAN BUMIRATU NUBAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 11 Oktober 2024
Dosen Pembimbing


Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG BULUSARI KECAMATAN BUMIRATU NUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Nama : RENDI PRATAMA

NPM : 1902031010

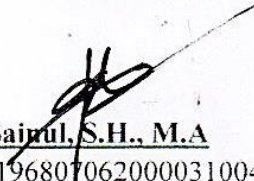
Fakultas : Syariah

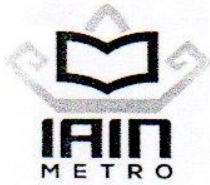
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, 11 Oktober 2024
Dosen Pembimbing


Saijul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1352/In.28.2/D/PP.00.3/11/2024

Skripsi dengan Judul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG BULUSARI KECAMATAN BUMIRATU NUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014”, Disusun oleh Rendi Pratama, NPM. 1902031010, Jurusan : Hukum Tatanegara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Jumat, 01 November 2024.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Sainul, SH, MA
Penguji I : Hendra Irawan, M.H.
Penguji II : Choirul Salim, M.H
Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. D. Santoso, M.H.
NIP. 19673161295031001

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG BULUSARI KECAMATAN BUMIRATU NUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

**Oleh:
RENDI PRATAMA**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kemampuan dan daya piker serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Kepemimpinan kepala kampung adalah kemampuan kepala kampung dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, serta melaksanakan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan Masyarakat. Kepemimpinan kepala kampung erat kaitannya dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki, yang dapat menunjang hubungannya dengan masyarakat. Gaya kepemimpinan kepala kampung dapat dilihat dari cara mereka mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, mengambil keputusan, dan mengawasi anggotanya. Keberhasilan dan kegagalan pemerintahan dan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala kampung.

Penelitian kali ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif artinya menjelaskan secara detail, dan terperinci permasalahan secara kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah 3 Narasumber yaitu, Kepala kampung, Kadus, dan Salah satu warga masyarakat. Dan yang menjadi Sumber Data Sekunder adalah buku, peraturan perundang-undangan, kebijakan, doktrin (pendapat ahli), dan data-data dari penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung bulusari meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan saluran irigasi dan infrastruktur jalan. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat nonfisik antara lain pembinaan generasi muda, perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Pola Kepemimpinan*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendi Pratama

NPM : 1902031010

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 01 November 2024
Yang Menyatakan



Rendi Pratama
NPM. 1902031010

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar-Ra’d: 11)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat yang luar biasa. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Dengan sepenuh hatiku persembahkan keberhasilan studi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu ibundaku tercinta Wijiarti dan ayahandaku tersayang Suryanto terimakasih atas doa, dukungan, motivasi, kasih sayang serta pengorbananmu sehingga aku mampu menyelesaikan pendidikanku dan menghantarkanku kedepan pintu gerbang kesuksesan.
2. Adikku Tria Rahmadani yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta do'a dan tak lupa pula kasih sayangnya.
3. Bapak Sinul, S.H M.A Selaku dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa memberikan ilmu, arahan serta bimbingan dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Hendra Irawan, M.H. dan Choirul Salim, M.H selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara yang senantiasa mensupport dan membimbing saya
5. Almamater IAIN Metro tercinta Program Studi Hukum Tata Negara (HTN). Fakultas Syari'ah (IAIN) Metro Lampung beserta seluruh dosen dan civitas akademika yang saya hormati dan saya banggakan.
6. Segenap dosen fakultas syari'ah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu kepada saya
7. Kepala kampung Bulusari beserta staf jajarannya yang telah menerima dengan baik untuk melaksanakan penelitian di kampung Bulusari

Terimakasih atas segala perjuangan, *support*, serta pengorbanan yang telah diberikan semua *'ala kulli haal*, semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang meraih kesuksesan, keberkahan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Saya panjatkan rasa dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA. Rektor IAIN Metro
2. Dr. Dri Santoso, M.H, Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Hendra Irawan, M.H sebagai ketua jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro
4. Sainul, S.H., M.A. selaku pembimbing skripsi yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi saya.

Saya sebagai penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Desa Staff jajarannya yang telah bersedia memberikan informasi awal data-data penelitian.

Saran dan masukan untuk penelitian ini sangat dibutuhkan demi perbaikan skripsi ini dan akan diterima dengan kelapangan hati dan akhirnya semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 01 November 2024

Penulis



Rendi Pratama

NPM. 1902031010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kepemimpinan	13
1. Pengertian Kepemimpinan	13
2. Fungsi Kepemimpinan	14
3. Pola Kepemimpinan	17
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	18
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	18
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	20
3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	22
4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	23
C. Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung.....	29

1. Fungsi Instruktif	30
2. Fungsi Konsultatif	30
3. Fungsi Partisipatif	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data	31
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	32
C. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	33
2. Observasi	34
3. Dokumentasi	34
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum	36
1. Sejarah Desa Bulusari	36
2. Letak Geografis	36
B. Program-program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bulusari Bumiratu Nuban Lampung Tengah.....	37
C. Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung Bulusari	42
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bulusari	48
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah kampung merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat kampung, pemerintah kampung sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur lingkungannya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya.¹ Pemerintah kampung diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala kampung serta para pembantunya, mewakili masyarakat kampung guna menjalankan hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Meskipun pemberdayaan memiliki potensi yang besar untuk menciptakan perubahan positif, namun sering kali di hadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan tanpa upaya yang tepat untuk mengatasi masalah ini upaya pemberdayaan dapat mengalami kesulitan atau bahkan gagal mencapai tujuan yang di inginkan. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan hambatan yang ada serta setrategi untuk menghadapinya sangatlah penting dalam memastikan pemberdayaan masyarakat .

Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pemberdayaan dan manfaatnya bagi individu dan masyarakat umumnya dapat menjadi hambatan dalam memobilisasi dukungan untuk program pemberdayaan masyarakat.

¹ Muhamad Mu'iz Raharjo M.Si S. Stp, *Kepemimpinan Kepala Desa* (Bumi Aksara, 2021), 34.

Pendidikan dan kampanye penyuluhan yang efektif di perlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai alat untuk menciptakan perubahan positif.

Oleh karena itu peran kampung yang merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukannya paling rendah dalam sistem pemerintahan mempunyai kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya.

Penjelasan butir 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat tiga kelembagaan desa yaitu:

1. Lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain terdiri dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
3. Lembaga Adat Desa adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat.²

Sedangkan pasal 94 UU 6 tahun 2014 dalam manajemen pemerintahan desa dan manajemen pembangunan desa, maka peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra

² Kushandajani, *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro, 2018), 5–6.

pemerintah desa. Disamping itu fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun peran LPMD adalah:

- a. Penyebaran masyarakat melalui sosialisasi agar penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Penyebaran masyarakat melalui sosialisasi agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasi, swadaya dan gotong royong sehingga usulan kegiatan pembangunan desa pro swadaya dan pro partisipasi,
- c. Melakukan pengkajian keadaan desa (musyawarah rt/rw/dusun), yang meliputi penyelarasan data, penggalian gagasan, dan penyusunan laporan berdasarkan 5 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa serta
- d. Inventarisasi jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat (apakah berupa uang, barang, tenaga atau lainnya) sebagai bahan masukan bagi kasie/kaur (pelaksana kegiatan anggaran).

Peran LPMD yang optimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan desa (musdes dan musrenbangdes) serta dalam mengawal usulan perencanaan pembangunan desa agar sesuai usulan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pro swadaya pro partisipasi masyarakat dalam forum

musyawarah desa dan musrenbangdesa sangatlah penting. Sejalan dengan adanya Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat sedemikian besar kompleks peran yang harus diemban oleh LPMD, tentunya diperlukan kesiapan sumberdaya LPMD itu sendiri serta bagaimana Kepala Desa mendudukkannya dalam keterlibatan dalam pembangunan desa.

Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa, dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa.³

Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, desa dalam hal ini adalah organisasi sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Kepemimpinan adalah “cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi”.⁴

Banyak definisi tentang pemimpin baik itu menurut ahli politik, ekonomi, sosial, antropologi (budaya) maupun agama. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi

³ Dr Rira Nuradhawati M.Si S. Ip, *Diskursus Kepemimpinan Situasional* (Deepublish, 2021), 53.

⁴ Prof Dr Dr H. Syamsul Arifin Fiscm M. Pd, Fisph Dan Nita Pujianti Mph S. Farm, Apt, *Kepemimpinan Pada Berbagai Sektor* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 42.

pencapaian satu atau beberapa tujuan. Kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab, bukan didunianya saja akan tetapi di akhirat juga.

Seorang pemimpin diharapkan mampu membina hubungan yang baik dengan rakyatnya, agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pendapat lain dikemukakan oleh Kartini Kartono yang menyatakan bahwa keberhasilan pemimpin berhubungan dengan pengelolaan kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan.⁵ Keberhasilan seorang pemimpin juga dapat ditentukan dari bentuk kerja sama dalam pembangunan yang tidak hanya untuk anggotanya, namun dari masyarakat untuk masyarakat. Pembangunan di sini dapat diartikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Masyarakat tidak dapat bergerak tanpa adanya pemimpin sebagai mediator dan motivator serta komunikator dalam pembangunan di berbagai bidang. Pemimpin harus dapat menjalankan ketiga fungsi itu dalam kelompoknya.

Dalam struktur organisasi, peran seorang pemimpin tidak ada artinya tanpa dukungan rakyatnya. Hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan hal yang mutlak karena keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat pula digambarkan sebagai hubungan patron-client (patronase), yaitu hubungan antara bapak dan anak. Bapak (pemimpin) berkewajiban melindungi anak-anaknya, sedangkan anak-

⁵ Riant Nugroho Pd Firre An Suprpto, Sap, M., *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 2: Kepemimpinan Dan Demokrasi Desa* (Elex Media Komputindo, 2021), 32.

anak harus patuh kepada bapaknya sebagai pemimpin. Hubungan antara pemimpin dan anggotanya sering kali bertolak dari kebutuhan anggotanya. Dalam kedudukan sosial, seorang pemimpin berperan mengontrol dan mengawasi serta menggerakkan segala aktivitas dalam masyarakatnya. Pemimpin yang baik akan dianggap oleh anggotanya sebagai cermin, guru, dan tokoh kunci (key person) dalam Pembangunan.⁶

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Kadus ia mengatakan bahwa: *“Memang di Desa bulusari, upaya pemberdayaan yang dilakukan belum seutuhnya menyentuh masyarakat, sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab kepala desa kurang menjalin komunikasi dengan masyarakat dan program yang dilakukan kurang menyentuh masyarakat serta kegiatan yang dilakukan jarang melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasa sangat tidak diperdulikan.”*⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seharusnya seorang pemimpin dalam masyarakat, sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan aparat setempat, baik aparat desa maupun tokoh masyarakat sehingga program kerja yang di susun dapat terlaksana dengan baik. Dan wewenangnya sebagai kepala desa dalam menjalankan pemerintahan berjalan dengan lancar.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan

⁶ Riant Nugroho Pd Firre An Suprpto, Sap , M., *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 3: Gaya Kepemimpinan Masyarakat* (Elex Media Komputindo, 2021), 36.

⁷ Wawancara, Kadus, “Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bulusari”, 20 Juni 2024, Pkl 09.00

merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan. Disamping itu kepala desa mengemban fungsinya antara lain :

- 1) Menggerakkan partisipasi Masyarakat
- 2) Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
- 3) Melaksanakan tugas dari pemerintahan di atasnya
- 4) Keamanan dan ketertiban masyarakatnya
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemerintah di atasnya.

Agar tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik maka bagi seorang Kepala Desa harus memiliki gaya tersendiri agar masyarakat ikut serta membantu kelancaran dari pembangunan. Bagi seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan tidak terlalu memaksakan kemauan sendiri. Keikutsertaan masyarakat Desa Bulusari dalam menyukseskan program pembangunan sangat diharapkan, dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dan penuh tanggung jawab dalam pembangunan desa keharmonisan yang dicita-citakan dapat tercapai.

Jika dilihat dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas yang diemban seorang pemimpin cukup berat dibandingkan dengan kemampuan yang dimilikinya, baik dari kemampuannya memimpin, cara dia memimpin serta bagaimana pendekatannya kepada masyarakat, maka dari itu harus diberikan penyempurnaan agar tercapai tujuan itu sendiri. Serangkaian dengan uraian di atas maka penulis berkeinginan mengadakan penelitian dengan mengangkat judul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG**

BULUSARI KECAMATAN BUMIRATU NUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung Bulusari Kecamatan Bumiratu Nuban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung Bulusari Kecamatan Bumiratu Nuban

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam Hukum Tata Negara tentang Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung Bulusari Kecamatan Bumiratu Nuban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan dengan Pemberdayaan

Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung
Bulusari Kecamatan Bumiratu Nuban

D. Penelitian Relevan

Pada bagian ini berisi penjelasan secara sistematis yang berkaitan dengan penelitian terdahulu (prior research) tentang permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi, Terdapat 3 Literatur sumber kajian terdahulu yang relevan yang dapat penulis ambil intisari dan sumber bacaan serta referensi di antaranya:

1. Skripsi yang di tulis oleh Irgandis Noventa pada tahun 2022 dengan judul Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu) yang pada intinya meneliti tugas pokok dan fungsi sebagai kepala desa yang ada di desa tersebut. Tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya Kepala Desa sudah melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dan ada yang belum sesuai seperti pembanguana, pembinaan masyarakkat, ibu-ibu PKK. Dengan undang-undang dan pasal yang diatur. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunnan Desa, pembinaan kemasyarakatan. Fiqh siyash tanfidziah adalah melaksanakan Undang-Undang, hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya sudah sesuai dengan

kepemimpinannya Kepala Desa Wonodadi sebagai imam, dan merupakan bagian siyasah tandfiziah yaitu melaksanakan undang-undang dan negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sobri Dalimunte pada tahun 2022 dengan Judul Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. esa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan desanya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang. peran kepala desa Rimbo Panjang dalam pelaksanaan pembangunan secara umum masih kurang optimal dan kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan Fiqih Siyasah dan Undang-Undang Desa

⁸ Irgandis Noventa, Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2022), 3.

yaitu dalam tinjauan Fiqih Siyasah pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab. Dalam tinjauan Undang-Undang Desa Kepala desa Rimbo Panjang kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa Rimbo Panjang dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Indah Fitri Rizqiani pada tahun 2021 dengan Judul Peran Pemerintah Desa dalam pengangkatan perangkat Desa. Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota, perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. dan Pengangkatan perangkat Desa di Indonesia biasanya melalui mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan yang harus dijalankan oleh pemerintah Desa. Tujuan dari adanya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dalam pengangkatan perangkat Desa oleh pemerintah Desa. dan dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara detail dan mendalam mengenai peran pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan hasil dari proses pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa oleh pemerintah Desa.

⁹ Muhamad Sobri Dalimunte, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Skripsi, Uin Suska Riau, 2020), 2.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini dari peran pemerintah Desa dalam pengangkatan perangkat Desa bahwa telah melaksanakan dengan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu dengan di bentuknya tim penjangkaran untuk membantu pemerintah Desa namun dalam pengangkatan perangkat Desa, dan di dalam pelaksanaannya pemerintah Desa kurang menunjukkan rasa profesionalitas dan transparan kepada masyarakat sehingga menimbulkan persoalan dan permasalahan yang di rasakan oleh masyarakat dan juga dapat di lihat dari organisasi, tanggung jawab, fungsi dan orientasi dari pemerintah Desa dalam pengangkatan perangkat Desa pada tahun 2019. dari penilaian masyarakat terhadap kurangnya pelayanan pemerintah Desa beserta perangkat Desa terpilih kepada masyarakat dapat di lihat tidak adanya peningkatan yang di rasakan masyarakat Desa dari aspek pembangunan, kesejahteraan, kesetaraan, dan di lihat dari tidak adanya peningkatan perubahan Desa di Desa Tawali kecamatan Wera.¹⁰

¹⁰ Indah Fitri Rizkiani, Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 19

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata Pemimpin, yang berarti seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersamasama melakukan aktivitas demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan.¹ Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar mau berperan serta dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti karena sangat menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Kepemimpinan itu esensinya adalah pertanggungjawaban. Masalah kepemimpinan masih sangat baik untuk diteliti karena tiada habisnya untuk dibahas disepanjang peradaban umat manusia.² Terlebih pada zaman sekarang ini yang semakin buruk saja moral dan mentalnya. Ibaratnya, semakin sulit mencari pemimpin yang baik (good leader).

¹ Kushandajani, *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 32.

² Lestari Makmuriana, *Kepemimpinan Transformasional* (Penerbit Nem, 2021), 53.

Kepemimpinan bukanlah hal yang baru, Kepemimpinan sudah ada sejak jaman para nabi-nabi, seperti dijelaskan dalam QS. Shad ayat 26 yang berbunyi :

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

"Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. Shaad: 26).³

2. Fungsi Kepemimpinan

Dalam upaya mewujudkan Kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi Kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya.

Fungsi kepemimpinan menjadi hal penting dalam pencapaian tujuan organisasi diantaranya unsur kepemimpinan dimana kepemimpinan

³ Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 26

merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai yang menjadikan salah satu faktor pelengkap, oleh karenanya untuk pencapaian yang baik dibutuhkan fungsi kepemimpinan yang menjadi pengurai dari berbagai macam sikap dan karakter pegawai. Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya.⁴ Sehubungan dengan hal tersebut fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya.

Fungsi kepemimpinan merupakan usaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan karyawannya untuk bekerja sebaik mungkin, dengan memiliki semangat yang tinggi, dan memotivasi yang tinggi guna mencapai tujuan organisasi. Hal ini terutama terikat dengan fungsi kepemimpinan mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Selain itu, fungsi pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan individu atau kelompok bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang bergerak kearah pencapaian tepat sasaran.

⁴ Soekarso Dan Iskandar Putong, *Kepemimpinan: Kajian Teoritis Dan Praktis* (Buku&Artikel Karya Iskandar Putong, 2015), 64.

Fungsi Kepemimpinan dibagi menjadi beberapa fokus.⁵

a. Fungsi Instruktif

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Dalam hal ini fungsi orang yang dipimpin adalah sebagai pelaksana perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah tersebut, sepenuhnya adalah merupakan fungsi Pemimpin.

b. Fungsi Konsultatif

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.

c. Fungsi Partisipatif

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap

⁵ Dr Lelo Sintani M.M Dkk., *Dasar Kepemimpinan* (Cendikia Mulia Mandiri, 2022), 51.

anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kesepakatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan fungsi masing-masing. Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dua arah, tetapi juga perwujudan pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara Pemimpin dan orang yang di pimpin baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan. Pemimpin tidak sekedar mampu membuat keputusan dan memerintah pelaksanaan, akan tetapi Pemimpin harus tetap dalam posisi sebagai Pemimpin yang melaksanakan fungsi Kepemimpinan bukan sebagai pelaksana.

3. Pola Kepemimpinan

Tipe kepemimpinan kepala Desa dibagi menjadi tiga tipe Kepemimpinan, yakni Kepemimpinan regresif, Kepemimpinan konservatif-involutif dan Kepemimpinan inovatif-progresif.

a. Kepemimpinan Regresif

Kepemimpinan Regresif dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis. Secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa, baik itu musyawarah desa (musdes), usaha ekonomi bersama desa dan lain-lain, sudah pasti akan ditolak.

b. Kepemimpinan konservatif-involutif

Kepemimpinan Konservatif-Involutif, merupakan model kepemimpinan kepala desa yang ditandai dengan hadirnya kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat desa.

c. Kepemimpinan inovatif-progresif

Kepemimpinan Inovatif-Progresif, kepemimpinan kepala desa tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel.⁶

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar-dasar yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.⁷ Pengertian proses

⁶ Dr Wendy Sepmady Hutahaean M.Th S. E., *Pengantar Kepemimpinan* (Ahlimedia Book, 2021), 49.

⁷ Dedeh Maryani Dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Deepublish, 2019), 23.

menunjukkan pada serangkaian tindakan atau Langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.

Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan keterampilan yang baik.

Makna memperoleh daya, kekuatan, kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata memperoleh mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri.⁸ Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya, kekuatan, kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan, ketidakberdayaan, tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya, kemampuan, kekuatan. Makna kata pemberian menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan, kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya.

⁸ Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Dan Aplikasi* (Fam Publishing, 2013), 37.

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. pemberdayaan Masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.⁹

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.¹⁰ Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian

⁹ Dr Zubaedi M.Pd M. Ag, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik* (Kencana, 2016), 58.

¹⁰ Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan* (Fam Publishing, 2019), 46.

untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisikmaterial.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas Pembangunan.¹¹

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk

¹¹ Dr Suhadi S.Km.,M.Kes, *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat* (Penerbit Cv. Sarnu Untung, T.T.), 59.

mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.¹² Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke 18 waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.

3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:¹³

- a. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

¹² Karta Sasmita Dkk., *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* (Bayfa Cendekia Indonesia, 2023), 63.

¹³ Dr Puji Hadiyanti M.Si, Drs Sri Koeswanto M.Si, Dan Dr M. Mawardi J. M.Si, *Model Pendekatan Kelompok Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Aagree Media Publishing, 2023), 68.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- 1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi Masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus

bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang,

serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

b. Program Pembangunan Pedesaan

Pemerintah di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, yaitu (1) pembangunan pertanian, (2) industrialisasi pedesaan, (3) pembangunan masyarakat desa terpadu, dan (4) strategi pusat pertumbuhan. Penjelasan macam-macam program sebagai berikut:

Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju. Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternative menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan

lapangan kerja dipedesaan. Program pembangunan masyarakat terpadu, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor. Selanjutnya program strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

Senada dengan program pembangunan pedesaan, J. Nasikun, mengajukan strategi yang meliputi: (1) Strategi pembangunan gotong royong, (2) Strategi pembangunan Teknikal – Profesional, (3) Strategi Konflik, (4) Strategi pembelotan kultural.

Dalam strategi gotong royong, melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.

Strategi pembangunan Teknikal–Profesional, dalam memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini peranan agen – agen pembaharuan sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaharuan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut. Agen pembaharuan merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara –cara yang lebih kreatif sehingga hambatan –hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir.

Strategi Konflik, melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan

permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat.

Strategi pembelotan kultural, menekankan pada perubahan tingkat subyektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi. Yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila adalah humanis-relegius. Strategi ini merupakan reaksi (pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang berkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dalam konsiderannya menyatakan bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta swadaya gotong royong dalam pembangunan di desa dan kelurahan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan (enabler), perantara

(mediator), pendidik (educator), perencana (planer), advokasi (advocation), aktivis (activist) dan pelaksana teknis (technisi roles) (lihat Pasal 10 Permendagri RI No.7 Tahun 2007).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Permendagri tersebut, tampaknya dalam strategi pemberdayaan masyarakat dapat dinyatakan sejalan dengan Strategi pembangunan Teknikal-profesional.

C. Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang menciptakan masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki kondisi dan situasi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat terjadi jika masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi. Dengan kata lain keberhasilan kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang menyelenggarakan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang di berdayakan untuk mengubah kondisi dan situasi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dilihat sebagai suatu proses perubahan dan pembaruan, dua unsur yang dianggap paling hakiki dan diharapkan saling mendukung dalam pengembangan masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya sedapat mungkin berdasarkan prakarsa sendiri dan pelayanan teknis atau bentuk pelayanan lain untuk mendorong prakarsa dan partisipasi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari pemberdayaan masyarakat adalah membantu seseorang atau kelompok

masyarakat untuk berdaya melalui kegiatan emansipasi yang terencana dan terarah juga terkendali. Melalui peran pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan dari rakyat melalui usaha rakyat. Diikuti dengan partisipasi masyarakat yang aktif agar membawa kepada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Lebih lanjut hersey dan Blanchard menjelaskan bahwa Fungsi kepemimpinan ada empat, yaitu:

1. Fungsi Instruktif, dimana pemimpin memberi instruksi dan mengawasi pelaksanaan tugas dan kinerja anak buahnya. Penerapannya pada bawahan yang masih baru bertugas.
2. Fungsi Konsultasi, dimana pemimpin menjelaskan keputusannya dan membuka kesempatan untuk bertanya, penerapannya pada bawahan yang memiliki kemampuan tinggi namun kemauan rendah
3. Fungsi Partisipatif, dimana pemimpin memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide sebagai dasar pengambilan keputusan. Penerapannya pada bawahan yang memiliki kemampuan rendah, namun kemauan kerja tinggi.
4. Gaya Delegatif, dimana pemimpin melimpahkan keputusan dan pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Penerapannya bagi bawahan yang memiliki kemampuan dan kemauan tinggi.¹⁴

¹⁴ Andrian Haro dkk., *Buku Ajar Kepemimpinan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 69.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (Field research). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya.¹ Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.² Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan kemudian disimpulkan.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer adalah peneliti mendapatkan data dari sumber aslinya berdasarkan interaksi secara

¹ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cv Jejak (Jejak Publisher), 2018), 53.

² Ifit Novita Sari Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022), 63.

langsung antara peneliti dengan orang-orang yang mempunyai kompetensi data dalam proses penelitian baik secara lisan atau tulisan.³ Pada kajian tersebut sumber data primer menghasilkan data primer yang terdapat respon dari 3 (Tiga) narasumber yaitu Iwan Masngudin (Kadus), Sutomo (Kepala Desa), Sunarto (Warga), yang memberikan keterangan tentang kondisi Penelitian di Di Kelurahan Bulusari Kecamatan Bumiratu Nuban.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya menunjang kelengkapan dan sebagai penjelas dari data primer.⁴ Data Sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, di mana data tersebut terdiri dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah serta lainnya yang memiliki kaitan erat dengan objek penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung Bulusari Kecamatan Bumiratu Nuban

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data diperoleh dari data

³ Elia Ardyan Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 40.

⁴ Dr H. Zuchri Abdussamad M.Si S. I. K., *Metode Penelitian Kualitatif* (Cv. Syakir Media Press, 2021), 37.

primer dan data sekunder.⁵ Data yang didapat dari hasil penelitian secara deskriptif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif dan kualitatif, secara sistematis dan berlanjut yang terdiri atas langkah-langkah penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber, biasanya untuk mencari data tentang suatu variable. wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara instruktur atau terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin, wawancara terstruktur atau terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah tersedia sedangkan wawancara tidak terstruktur artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin artinya kombinasi antara Wawancara terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas.⁶ Dari 3 macam metode wawancara tersebut maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang ditunjukkan kepada masyarakat Bulusari. Yang berjumlah 3 orang yaitu:

⁵ Fitria Widiyani Roosinda Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Zahir Publishing, T.T.), 66.

⁶ Prof Dr A. Muri Yusuf M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), 49.

Kadus, Kepala Desa dan Warga, metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data terkait penelitian yang akan peneliti lakukan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian di lapangan dan pelaksanaan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung Bulusari Kecamatan Bumiratu Nuban

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku surat kabar notulen rapat dan sebagainya.⁸ Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian tentang Pola kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan.⁹ Data yang diperoleh dari wawancara,

⁷ Imam Gunawan M.Pd S. Pd, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022), 63.

⁸ Rifka Agustianti Dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022), 53.

⁹ Saputra Adiwijaya Dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 45.

observasi, dan dokumentasi di desa Bulusari. Untuk menganalisa data yang didapat dari observasi ini peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu memberikn rancangan masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik suatu masalah yang dapat dipahami dengan jelas.

Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data yaitu pola piker deduktif yang berarti data yang diperoleh dengan metode yang digunakan dalam berfikir bertolak dari hal-hal umum ke khusus sehingga dapat dikemukakan jawaban dari masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah kampung Bulusari

Awal mulanya, Kampung Bulu Sari merupakan sebuah wilayah yang masih sangat jarang penduduknya. Tetapi karena letaknya yang strategis, terletak di jalur jalan lintas maka banyak orang yang mulai datang dan membeli lahan di Bulu Sari dan mendirikan rumah. Semakin hari semakin ramai, sehingga dengan sendirinya terbentuklah sebuah kampung yang definitif dan di akui pemerintah.

Kampung Bulu Sari Merupakan Salah Satu Kampung yang ada dilingkup Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Camat Bumiratu Nuban terletak di Kampung Bulu Sari. Dengan seiring perkembangan Kampung Bulu Sari telah mengadakan pemekaran wilayah, yaitu Kampung Tulung Kakan pada tahun 2007.

2. Letak Geografis

Kampung Bulu Sari merupakan salah satu kampung di bawah naungan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Luas wilayah Kampung Bulu Sari sekitar 691 Ha, dan memiliki suhu rata rata 36 C. Jarak Kampung Bulu Sari dengan kecamatan 0 Km, dan dengan

ibukota Kabupaten 10 Km. Batas Batas wilayah Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumiratu Nuban yaitu :

- a. Sebelah Utara: Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih
- b. Sebelah Timur: Kampung Sidowas dan Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumiratu Nuban
- c. Sebelah Selatan: Kampung Bumiratu Kecamatan Bumiratu Nuban
- d. Sebelah Barat: Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih

Jumlah penduduk Kampung Bulu Sari sekitar 2969 jiwa, terdiri dari laki laki sebanyak 1493 jiwa dan perempuan sebanyak 1476 jiwa, yang tersebar dalam 904 Kepala Keluarga.

B. Program-program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bulusari Bumiratu Nuban Lampung Tengah

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat mandiri dengan mengenali potensi yang dimilikinya. Untuk memperkuat komunitas, dapat memanfaatkan potensi lokal di wilayah tempat mereka tinggal.¹ Potensi yang dimiliki daerah antara lain kekayaan budaya, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain. Misalnya, potensi alam suatu wilayah sangat bergantung pada iklim, kondisi geografis, dan bentang alamnya. Setiap program pemberdayaan tentunya mempunyai tujuan tertentu yang harus dicapai, seperti meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk mandiri mengelola urusan kemasyarakatannya.

¹ Sutomo (kepala kampung), wawancara mengenai *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan pembangunan,(kampung Bulusari),*.

Singkatnya, peran kepala kampung dalam penguatan masyarakat dalam kehidupan demokratis dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan mencerminkannya dalam program pembangunan, menyusun perencanaan kegiatan, serta memperkuat dan mengembangkan masyarakat melalui gotong royong.

Guna mengetahui secara rinci mengenai bagaimana program pemberdayaan masyarakat di kampung Bulusari peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Sutomo selaku Kepala kampung Bulusari yang menyatakan:

“Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan saluran irigasi dan pembangunan infrastruktur jalan. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat nonfisik antara lain pembinaan generasi muda, perbaikan gizi ibu hamil dan balita”²

Kepemimpinan kepala kampung dalam proses pencapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah merencanakan secara matang program pemberdayaan dari awal dan menetapkan anggaran sesuai dengan rencana yang dilaksanakan. Selain itu, Bapak Sutomo menyatakan tercapainya tujuan pemberdayaan terlihat apabila adanya peningkatan pengetahuan oleh masyarakat sehingga dapat direalisasikan di kehidupan nyata. Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil pernyataan oleh Bapak Iwan masngudin selaku Kadus, yang menyatakan:

² Wawancara, Bapak Sutomo “*Mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat*, (Bulusari, 17 September 2024). Pkl.11.00 Wib

“Tujuan dari program pemberdayaan ini adalah untuk menyentuh seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat itu sendiri. Bagaimana penerapan dalam kaitannya dengan peran kepemimpinan kepala kampung dalam mencapai tujuan akan dilakukan melalui konsultasi dan diskusi itu bersama-sama. Biasanya berdasarkan hasil musyawarah untuk mencapai tujuan, Kepala kampung membentuk panitia untuk melibatkan masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. Selain, masyarakat juga dapat memberikan masukan dan saran jika dirasa program pemberdayaan kurang tepat. Ketika tujuan ini tercapai, maka akan menjadi jelas kapan masyarakat mampu mengelola Program Pemberdayaan secara mandiri. Tujuan yang dicapai selama ini adalah membina kekeluargaan dalam masyarakat, meningkatkan ketajaman ekonomi masyarakat, dan mengajarkan masyarakat bagaimana memanfaatkan potensi alam lingkungannya untuk membentuk masyarakat yang mandiri”.³

Pada proses pencapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat, tindakan yang dilakukan Kepala kampung Bulusari ialah dengan melakukan musyawarah dengan aparat desa serta memberikan kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kritik dan saran sehingga apabila terdapat hal-hal yang kurang sesuai dapat langsung diperbaiki. Selain itu, Bapak Sutomo menyatakan tercapainya tujuan pemberdayaan terlihat apabila masyarakat mampu untuk mengelola dan menjalankan program pemberdayaan secara mandiri. Hasil ini juga sejalan dengan hasil wawancara oleh Iwan Masngudin, selaku Kadus bulusari yang menyatakan:

“Tujuannya jelas dan tujuannya untuk masyarakat. Cara mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberikan dukungan kepada masyarakat hingga mampu berjalan dan bekerja secara mandiri, benar-benar dilatih, diinstruksikan dan disosialisasikan pemerintah juga mendukung kebutuhan masyarakat melalui Program Pemberdayaan, sebuah tujuan yang saat ini sedang dicapai. Saya percaya bahwa

³ Wawancara, Bapak Iwan Masngudin “*Mengenai Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat*, (Bulusari, 18 September 2024). Pkl.10.30 Wib

membangun masyarakat yang mandiri dan dapat menghasilkan keuntungan adalah hal yang penting. Selain orang yang mempunyai penghasilan sendiri, juga telah diberikan ilmu pertanian kepada masyarakat, dan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang didapat di masa depan”.⁴

Kepemimpinan Kepala kampung dalam proses pencapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat ialah dengan diberikan pendampingan selama program pemberdayaan berlangsung hingga masyarakat itu sendiri mampu secara mandiri berjalan sendiri. Selain itu, Bapak Sutomo menyatakan tercapainya tujuan pemberdayaan terlihat apabila masyarakat mampu untuk mengelola sendiri program pemberdayaan yang telah berjalan hingga mampu untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pernyataan tersebut yang menyatakan tujuan dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat kampung ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tidak terlepas dari peran pemimpin sebagai orang yang dituakan di kampung. Selain itu, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, menjadikan masyarakat yang swadaya, mandiri dan madani. Guna mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggapan dari sisi masyarakat selaku penerima program pemberdayaan, untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sunarto selaku masyarakat dan merupakan anggota pemuda yang menyatakan:

“Tujuan dari pemberdayaan ini sudah jelas. Tujuannya adalah untuk pemerintah kampung dan seluruh Masyarakat. Jika menyangkut

⁴ Wawancara, Bapak Iwan Masngudin “*Mengenai Cara Mencapai Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat*, (Bulusari, 18 September 2024). Pkl.14.00 Wib

kepemimpinan kepala kampung, maka langkah yang dilakukan untuk memastikan tujuan tersebut tercapai adalah pemberdayaan. Kita bersama-sama melakukan program tersebut.dengan pemangku kepentingan”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dipahami bahwa mayoritas narasumber setuju bahwa tujuan adanya program pemberdayaan masyarakat di Bulusari sasaran utamanya ialah masyarakat yang diberdayai. Selain itu, sebagai suatu kegiatan yang berproses, maka seharusnya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai tindakan kepemimpinan Kepala kampung Bulusari guna mencapai tujuan program pemberdayaa ialah dengan merencanakan program tersebut secara matang, lalu melakukan penganggaran untuk kemudian di realisasikan sesuai dengan perencanaannya. Tidak hanya itu, adanya pemberian dukungan berupa memfasilitasi sosialisasi/pelatihan. Selain itu, mayoritas narasumber juga memiliki pernyataan yang sejalan mengenai apa saja tujuan yang telah tercapai dalam program pemberdayaan, diantaranya adalah peningkatan pengetahuan masyarakat sesuai bidang program pemberdayaan, menumbuhkan kekeluargaan di antara masyarakat, meningkatkan wawasan masyarakat seputar bisnis, mengajarkan masyarakat untuk menjadi

⁵ Wawancara, Bapak Sunarto “*Mengenai Tujuan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bulusari, 20 September 2024). Pkl.10.30 Wib

masyarakat yang mandiri, serta adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Selain memandu masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri, Kepala kampung dalam memimpin perlu mengutamakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, seorang pemimpin atau kepala akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat memberi pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah tujuan organisasi.

C. Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung Bulusari

Kepala kampung adalah orang yang memegang peranan kepemimpinan di suatu kampung. Kepala kampung bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung. Kepala kampung tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam pemerintahan, namun juga memegang peranan penting dalam pembangunan kampung. Pembangunan kampung adalah tanggung jawab kepala kampung, dan keberhasilan kampung bergantung padanya. Salah satu cara untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang dapat memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada adalah dengan memperkuat komunitas. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada masyarakat sebagai subjek dan penerima, atau sebagai subjek dan subjek yang memperoleh manfaat dari proses pencarian solusi dan peningkatan kesejahteraan dari hasil-hasil pembangunan.

Disamping kemampuan kepala kampung dalam memberdayakan masyarakat, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan

kampung sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di kampung. Sehingga penilaian terhadap aparatur kampung tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Hampir setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di kampung Bulusari dilaksanakan melalui musyawarah. Kepala kampung selalu melakukan koordinasi dengan perangkat desanya dalam melakukan setiap kegiatan. Selain berkoordinasi dengan bawahannya, kepala kampung juga selalu berkoordinasi dengan atasannya seperti camat dan pemerintah daerah.

Pada dasarnya pembangunan kampung merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap pembangunan di kampung merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Kepala desa mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif melalui

organisasi yang ada di kampung. Sehingga komunikasi antara aparat pemerintah dengan warganya dapat terjalin melalui organisasi.

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepala kampung sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hal ini beliau lakukan agar merangsang masyarakat untuk turut aktif dalam proses pembangunan. Peranan pemerintah sendiri khususnya kepala kampung adalah sebagai fasilitator dalam pembangunan. Kepala kampung juga tidak pernah membedakan warganya. Sehingga tidak terjadi kecemburuan antar masyarakat yang akan mengakibatkan pada konflik sosial.

Adapun salah satu program pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung Bulusari adalah perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Perbaikan gizi ibu hamil dan balita menjadi salah satu program utama kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya. Karena generasi penerus adalah modal utama dalam pembangunan. Untuk mendapatkan generasi muda yang berkualitas maka perlu dipersiapkan sedini mungkin, sejak anak masih dalam kandungan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala kampung, yang mengungkapkan bahwa: “Kesehatan ibu hamil sangatlah penting, gizi ibu hamil perlu diperhatikan agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga sejak masih dalam kandungan. Hal ini guna menekan angka kematian ibu dan anak, juga agar anak lahir dalam keadaan sempurna, tidak cacat dan mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu pemberian gizi dan nutrisi pada anak sangat perlu diperhatikan sejak anak dalam kandungan, hal ini perlu menjadi perhatian kami selaku pemerintah kampung karena untuk peningkatan kuantitas masyarakat yang nantinya mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa bulusari”.⁶

Program ini juga bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, program ini juga bermanfaat untuk memperbaiki gizi anak, agar anak-anak tidak rentan akan penyakit. Selain itu untuk memperkuat peran ibu dalam keluarga. Kegiatan perbaikan gizi ibu hamil dan anak dilakukan antara lain dengan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang dilakukan tiap dua kali dalam sebulan. Makanan tambahan yang dimaksud adalah bubur sehat bagi balita yang berumur 8 bulan hingga 3 tahun. Selain itu diberikan pula susu gratis bagi ibu hamil guna meningkatkan gizi pada ibu hamil. Penimbangan rutin juga dilakukan setiap dua kali dalam sebulan di posyandu yang ada di desa. Selain itu, pemberian penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan dilakukan hampir disetiap bulannya. Yang dilakukan di aula desa. Selain penyuluhan tentang pentingnya kebersihan, penyuluhan tentang gizi dan makanan sehat juga sering diadakan. Penyuluhan ini diberikan oleh dinas kesehatan bekerjasama dengan bidan desa.

⁶ Wawancara, Bapak Sutomo “*Mengenai Salah Satu Program Pemberdayaan Masyarakat*, (Bulusari, 23 September 2024). Pkl.09.30 Wib

Kepala kampung Bulusari dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung Bulusari memiliki peranan yang sangat sentral. Baik itu dalam pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang ada. Kepala kampung berperan aktif dalam proses pembangunan. Kepala kampung senantiasa mengajak warganya bergotong royong dalam membangun, Bahkan tak jarang juga terjun langsung mengawasi dan ikut dalam pembangunan fisik yang dilakukan di kampung nya.

Untuk pembangunan non fisik, khususnya meningkatkan swadaya masyarakat. Kepala kampung senantiasa mengajak dan melakukan pembinaan kepada generasi muda. Kepala kampung juga turut aktif dalam setiap kegiatan organisasi pemuda yang ada. Seperti, kepala kampung turut aktif dalam setiap rapat-rapat yang diadakan oleh kelompok usaha. Kepala kampung selalu memberikan masukan dan saran serta pengarahan. Kepala kampung juga selalu mengajak warganya untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang ada. Seperti penyuluhan penyuluhan yaitu, penyuluhan kesehatan, juga kegiatan keagamaan lainnya. Kepala kampung juga selalu memberikan pengarahan kepada warganya agar senantiasa memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Bahkan juga turut aktif dalam gotong royong membersihkan lingkungan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Bapak Kepala kampung Bulusari benar-benar telah melakukan pemberdayaan masyarakat. Bahkan beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang

ada. Sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Diantara lain; meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pertanian, meningkatkan kemandirian petani dan warga, meningkatkan perekonomian warga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kepala kampung dalam menyikapi ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Kepala kampung juga selalu bersikap transparan baik masalah pemberdayaan masyarakat maupun masalah bantuan yang didapatkan baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Hampir semua bantuan yang masuk selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, juga selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta menerima setiap saran dan masukan.

Hal ini menunjukkan bahwa kampung Bulusari dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan kepala kampung dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian dan mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif, namun sayangnya program pemberdayaan yang dilakukan masih sebatas pada program yang inisiatifnya berasal dari pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, belum terdapat program pemberdayaan yang anggarannya berasal dari internal pemerintah kampung itu sendiri.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bulusari

Dalam setiap upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam pemberdayaan masyarakat, kepala kampung pasti akan menemui kendala dan harus berusaha mencari jalan keluar/penyelesaian terhadap setiap permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan Masyarakat. Faktor yang mempengaruhi peran kepala kampung dalam penguatan masyarakat terdiri dari faktor pendukung dan penghambat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala kampung, menunjukkan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:⁷

1. Kewibawaan dalam memimpin, Kepala kampung adalah sosok pemimpin yang tegas disiplin dan dekat dengan masyarakatnya, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat nya, agar kewibawaannya tidak jatuh dimata masyarakatnya sehingga dalam menjalankan perannya sebagai Kepala kampung dalam hal ini sangat berpengaruh. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan penelitian menyatakan bahwa Kepala kampung Bulusari adalah pemimpin yang tegas, disiplin dan peduli dengan masyarakat, sehingga ketika beliau memberikan arahan atau perintah kepada aparatnya, maka dengan senang hati kami bersegera untuk melaksanakan perintah beliau dan ketika ada masyarakat yang

⁷ Wawancara, Bapak Sutomo “*Mengenai Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Program Pemberdayaan Masyarakat*, (Bulusari, 23 September 2024). Pkl.11.30 Wib

meminta solusi dari permasalahan yang dihadapi, beliau dengan senang hati akan membantu masyarakatnya.

2. **Kekuasaan.** Dengan kekuasaan yang dipegang oleh kepala kampung, beliau mampu memberikan pengaruh dan menggerakkan serta bisa memberi instruksi langsung kepada aparaturnya agar melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan dan bisa dilaksanakan secepatnya di mana hal ini untuk mencapai tujuan bersama sebagai perwujudan perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Kepala kampung lebih mudah memberikan perintah kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas secepatnya dengan adanya kekuasaan yang dimiliki dan mudah bagi beliau memanggil bawahannya atau aparat ke rumahnya untuk mengerjakan tugas yang ada, serta kekuasaan yang dimiliki kepala kampung memudahkan beliau mengontrol kinerja para aparaturnya.
3. **Kemampuan,** masyarakat di kampung Bulusari sendiri masih menjunjung tinggi nilai dan norma-norma serta adat yang sifatnya turun temurun yang ada dalam masyarakat yang bersifat dan bermanfaat bagi masyarakat, maka dari itu dibutuhkan pula dari pemimpin yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis maupun sosial yang baik sehingga tidak diragukan lagi dalam memimpin. Menurut warga, kepala desa adalah sosok pemimpin yang berasal dari keluarga baik-baik, dihormati dan dari keluarga yang memiliki kemampuan dan keterampilan bersosialisasi yang baik.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kepemimpinan kepala kampung dalam pemberdayaan masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, meliputi:⁸

- a. Partisipasi penduduk merupakan salah satu kendala yang dihadapi kepala kampung. Karena masyarakat sendiri sulit dikumpulkan untuk mengikuti rapat/sosialisasi, serta cenderung tidak tertarik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan hanya mengutamakan pekerjaan masing-masing. Salah satu masalah yang dihadapi kepala desa adalah partisipasi masyarakat. ketika masyarakat diperintahkan untuk melakukan kerja bakti seperti di balai dan fasilitas umum lainnya, kurang masyarakat yang ikut berpartisipasi karena lebih sibuk dengan urusan pribadi mereka lebih mengutamakan pekerjaan pribadi dari pada kegiatan Bersama.
- b. Selain partisipasi masyarakat, fasilitas dan peralatan juga sebagai pendukung dalam hal pemberdayaan masyarakat. Semakin lengkap fasilitas dan peralatan yang ada akan membuat masyarakat tertarik dengan kegiatan pemberdayaan, sebaliknya jika fasilitas kurang memadai dan peralatan yang kurang tersedia akan menurunkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, fasilitas dan peralatan ini masih menjadi kendala yang dihadapi oleh Kepala kampung. Diakui oleh aparatur kampung bulusari, bahwa aparat kampung dan Kepala kampung masih menggunakan barang dan

⁸ Wawancara, Bapak Sutomo “*Mengenai Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Program Pemberdayaan Masyarakat*, (Bulusari, 23 September 2024). Pkl 12,00 Wib

peralatan seadanya. Salah satu contohnya adalah komputer, sebagai alat pendukung kerja dalam pembuatan administrasi di kampung masih sedikit jumlahnya. Serta tenaga teknis dalam bidang tertentu masih butuh pelatihan seperti pelatihan komputer, rancangan bangunan dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Bapak Kepala kampung Bulusari benar-benar telah melakukan pemberdayaan masyarakat, hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dan juga pasal 67 ayat 2 menyatakan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Bahkan beliau dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung Bulusari. Sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pemberdayaan tersebut. Adapun manfaatnya antara lain; meningkatkan pengetahuan dan taraf hidup sehat masyarakat, meningkatkan kemandirian pertanian, meningkatkan perekonomian, serta menurunkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Kepala kampung dalam menyikapi hal ini tentunya terbantu dengan adanya bantuan dana dari pemerintah/dana desa. Kepala kampung juga selalu bersikap transparan baik masalah pemberdayaan masyarakat maupun masalah pemerintahan yang ada di kampung Bulusari, yang mana hal ini juga sejalan dengan pasal 68 ayat 1 yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak untuk meminta dan

mendapatkan informasi, mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah desa. Begitupun dalam mengambil suatu kebijakan, beliau selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta menerima setiap saran dan masukan dari masyarakat.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan program pemberdayaan di kampung Bulusari dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada pemerintah kampung khususnya Kepala kampung Bulusari lebih mengarahkan dan memberi pedoman kepada masyarakat Bulusari bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat dan kemandirian masyarakat dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidak berdayaan.
2. Sangat diperlukan optimalisasi peran Kepala kampung Bulusari dengan upaya maksimal dalam menjalani komunikasi yang baik kepada masyarakat untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam program pemberdayaan, hal ini sangat berguna untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera.
3. Kepala kampung Bulusari hendaknya lebih bisa mengoptimalkan lagi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

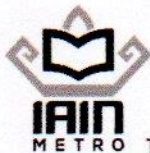
DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Saputra, Anugerah Tatema Harefa, Santi Isnaini, Syarif Raehana, Budi Mardikawati, Dr Rudy Dwi Laksono, Saktisyahputra Saktisyahputra, Dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Agustianti, Rifka, Pandriadi, Lissiana Nussifera, Wahyudi, L. Angelianawati, Igat Meliana, Effi Alfiani Sidik, Dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media, 2022.
- Ardyan, Elia, Yoseb Boari, Akhmad Akhmad, Leny Yuliyani, Hildawati Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, Dan Loso Judijanto. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Bahri, Efri Syamsul. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Fam Publishing, 2019.
- . *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Dan Aplikasi*. Fam Publishing, 2013.
- Fiscm, Prof Dr Dr H. Syamsul Arifin, M. Pd, Fisph, Dan Nita Pujianti Mph S. Farm, Apt. *Kepemimpinan Pada Berbagai Sektor*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Haro, Andrian, Enggal Sari Maduratna, Sulaiman Sulaiman, Jenny Nancy Kaligis, Nur Hasanah, Tuti Handayani, H. Sa'dianoor, Ucok Binanga Nasution, Dan Dadang Suhardi. *Buku Ajar Kepemimpinan*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Uu Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, T.T.
- Kushandajani. *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro, 2018.
- Makmuriana, Lestari. *Kepemimpinan Transformasional*. Penerbit Nem, 2021.
- Maryani, Dedeh, Dan Ruth ^r *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish, 2019.

- Lelo Sintani, Dr H. Fachrurazi Mm S. Ag, Mulyadi Mm Se, Ita Nurcholifah Mm S. Ei, Dr Fauziah Mm, Sri Hartono Mm Se, Dan Dr Ikhsan Amar Jusman M.Si Se. *Dasar Kepemimpinan*. Cendikia Mulia Mandiri, 2022.
- Zubaedi, M. Ag. *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Kencana, 2016.
- Imam Gunawan, S. Pd. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Zuchri Abdussamad, S. I. K. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Syakir Media Press, 2021.
- Puji Hadiyanti, Drs Sri Koeswantono M.Si, Dan Dr M. Mawardi J. M.Si. *Model Pendekatan Kelompok Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Agree Media Publishing, 2023.
- Rira Nuradhawati, S. Ip. *Diskursus Kepemimpinan Situasional*. Deepublish, 2021.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S. Stp. *Kepemimpinan Kepala Desa*. Bumi Aksara, 2021.
- Wendy Sepmady Hutahaean, S. E. *Pengantar Kepemimpinan*. Ahlimedia Book, 2021.
- Riant Nugroho, Firre An Suprpto, Sap , M. *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 2: Kepemimpinan Dan Demokrasi Desa*. Elex Media Komputindo, 2021.
- . *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 3: Gaya Kepemimpinan Masyarakat*. Elex Media Komputindo, 2021.
- Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A. A. Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, Dan Muhammad Iqbal Fasa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing, T.T.
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Karwanto, Supriyono, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press, 2022.

- Sasmita, Karta, Durotul Yatimah, Heni Herawati, Dan Retno Dewi Lestari. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Bayfa Cendekia Indonesia, 2023.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Suhadi. *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat*. Penerbit Cv. Sarnu Untung, T.T.
- Soekarso, Dan Iskandar Putong. *Kepemimpinan: Kajian Teoritis Dan Praktis*. Buku&Artikel Karya Iskandar Putong, 2015.
- Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0933/In.28.1/J/TL.00/08/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Sainul (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **RENDI PRATAMA**
NPM : 1902031010
Semester : 11 (Sebelas)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Judul : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA
KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG BULUSARI KECAMATAN
BUMIRATU NUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Agustus 2024
Ketua Jurusan,



Hendra Irawan M.H
NIP 19861005 201903 1 007

ALAT PENGUMPUL DATA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA
KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG BULUSARI KECAMATAN
BUMIRATU NUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Selama Penelitian Berlangsung Peneliti Mencatat dan Mendeskripsikan Hasil Wawancara
2. Waktu Pelaksanaan Wawancara Sewaktu-waktu masih bisa berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dilapangan.

B. Identitas

1. Informan : Kepala Kampung, Masyarakat
2. Alamat : Kelurahan Bulusari, Kecamatan Bumiratu Nuban
3. Waktu Pelaksanaan : Bulan September s/d Selesai

C. Wawancara Dengan Kepala Kampung

1. Apa manfaat dari program pemberdayaan masyarakat di desa Bulusari?
2. Bagaimana keadaan masyarakat desa sebelum adanya program pemberdayaan masyarakat?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat?
4. Apakah ada kerjasama dari pihak swasta untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat?
5. Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
6. Jika ada problem dalam program pemberdayaan Masyarakat apa yang anda lakukan?

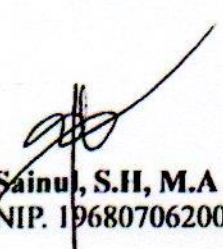
D. Wawancara Dengan Masyarakat

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat?
2. Apakah kepala kampung ikut serta dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat?
3. Apakah kepala kampung memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat?
4. Bagaimana keadaan masyarakat desa sesudah adanya program pemberdayaan masyarakat?
5. Bagaimana Pelayanan Kepala Kampung Dalam Melayani Masyarakat terutama pada Pemberdayaan Masyarakat?

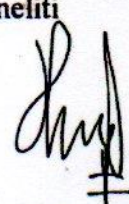
E. Dokumentasi

1. Foto Lokasi Penelitian
2. Foto wawancara dengan kepala Kampung
3. Foto wawancara dengan masyarakat

Dosen Pembimbing


Sainul, S.H, M.A
NIP. 196807062000031004

Metro, 28 Agustus 2024
Peneliti


Rendi Pratama
NPM. 1902031010

OUTLINE

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG BULUSARI KECAMATAN BUMIRATU NUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kepemimpinan
 - 1. Pengertian Kepemimpinan
 - 2. Fungsi Kepemimpinan

3. Pola Kepemimpinan
- B. Pemberdayaan Masyarakat
 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat
 4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
- C. Pembedayaan Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung
 1. Fungsi Instrukturif
 2. Fungsi Konsulfatif
 3. Fungsi Partisipatif

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Data Primer
 2. Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Observasi
 3. Dokumetasi
- D. Teknik Analisi Data

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

- A. Gambaran Umum
 1. Sejarah Kampung Bulusari
 2. Letak Geografis
- B. Program-program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bulusari Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
- C. Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pola Kepemimpinan Kepala Kampung Bulusari
- D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bulusari

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Sainul, S.H, M.A
NIP. 196807062000031004

Metro, 26 Agustus 2024
Peneliti



Rendi Pratama
NPM. 1902031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0972/In.28/D.1/TL.00/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KAMPUNG BULUSARI
KEC. BUMI RATUNUBAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0973/In.28/D.1/TL.01/09/2024, tanggal 04 September 2024 atas nama saudara:

Nama : **RENDI PRATAMA**
NPM : 1902031010
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KAMPUNG BULUSARI KEC. BUMI RATUNUBAN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG BULUSARI KEC. BUMI RATUNUBAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG BULUSARI KECAMATAN BUMIRATUNUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 September 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0973/In.28/D.1/TL.01/09/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : RENDI PRATAMA
NPM : 1902031010
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG BULUSARI KEC. BUMI RATUNUBAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POLA KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG BULUSARI KECAMATAN BUMIRATU NUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 September 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

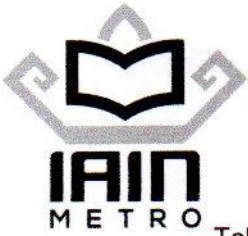


NIP



Mengetahui,
Pejabat Setempat

SUTOMO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1018/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rendi Pratama
NPM : 1902031010
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902031010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Oktober 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpn (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rendi Pratama

Fakultas/Jurusan : Syariah/THN

NPM : 1902031010

Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		SKRIPSI AEO opt & munagabiyalla	

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., M.A

NIP. 196807062000031004

Mahasiswa

Rendi Pratama

NPM. 1902031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rendi Pratama
NPM : 1902031010

Fakultas/Jurusan : Syariah/THN
Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		BAB IV Fotnof Sesuai' zofero	
		BAB V Aspek Hukumnya belum nampak agar pasal Hukum ditampilkan	

Dosen Pembimbing

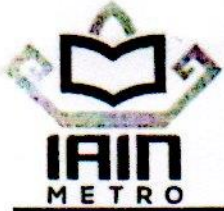
Sainul, S.H., M.A

NIP. 196807062000031004

Mahasiswa

Rendi Pratama

NPM. 1902031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rendi Pratama
NPM : 1902031010

Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>APP & Out line APP</p> <hr/>	

Dosen Pembimbing,

Sainul, SH.,MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Rendi Pratama

NPM. 1902031010

DOKUMENSTASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat kepada para ibu hamil oleh bidan setempat



Peneliti Melakukan Wawancara Kepada Salah Satu Pemuda kampung Bulusari



Pemberdayaan bidang infrastruktur, pembangunan jalan rigid beton antara dusun 2 dan dusun 3 kampung Bulusari



Pemberdayaan masyarakat bidang keagamaan, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke 79



Wawancara dengan bapak kepala kampung Bulusari terkait dengan pemberdayaan masyarakat di kampung Bulusari



Balai Kampung Bulusari



Tugu peresmian jalan rigid beton



Penyuluhan kesehatan bersama dengan dinas kesehatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Rendi Pratama, lahir pada tanggal 14 Juni 2000, lahir dan besar di kampung Bulusari, kecamatan Bumi Ratu Nuban, kabupaten Lampung Tengah. Putra dari pasangan bapak Suryanto dan Ibu Wiji arti. Peneliti anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar di SDN 1 Terbanggi Subing dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 4 Gunung Sugih dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan lagi pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, SMK Karya Wiyata Punggur selesai pada tahun 2019. Saat ini peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung di Fakultas Syariah (FS) program studi Hukum Tata Negara (HTN), di mulai pada semester 1 TA 2019/2020